

ANALISIS KEGAGALAN KERJASAMA INDONESIA-TIONGKOK DALAM PROJECT 6

Kharisma Dwi Fausi

ABSTRAK

Dalam era globalisasi ini, jarak bukanlah menjadi hambatan bagi manusia. Jarak yang membentang ratusan kilometer hingga, berbeda negara dan kawasan seolah-olah semakin dekat, demikian pula dengan perdagangan. Saat ini suatu negara dapat menjual barang dari negara tersebut keseluruh penjuru dunia dengan mudah. Saat ini jalur laut masih memegang peran jalur yang sangat penting untuk mendistribusikan barang yang diperdagangkan. Tidak heran jika negara-negara maju sangat fokus pada masalah keamanan maritim. Dalam teori kamanan maritim disebutkan bahwa segala bentuk ancaman yang terjadi di laut baik itu militer maupun non militer seperti permasalahan lingkungan, masuk kedalam ranah keamanan maritim. Tiongkok sendiri menjadi salah satu negara yang fokus terhadap keamanan maritim terutama di Selat Malaka. Tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 lalu, membuat Tiongkok akan memberikan bantuan perbaikan suar yang rusak akibat tsunami yang dikenal dengan *project 6*. Kerjasama secara resmi dimulai pada tahun 2011, namun di tahun 2013 pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan menganggap kerjasama ini selesai tanpa bantuan dari Tiongkok. Faktor yang membuat kerjasama ini batal karena Tiongkok meminta pasir untuk dikirim ke Tiongkok dan karena keadaan yang mendesak membuat Indonesia secara mandiri menyelesaikan *project 6* ini. Selain itu disiapkannya Jalur Sutra membuat Selat Malaka tidak lagi jalur perdagangan satu-satunya Tiongkok. Teori yang tepat untuk menggambarkan kasus diatas adalah teori pilihan rasional. Indonesia dihadapkan oleh dua pilihan dan memilih salah satu yang dianggap paling tepat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara di Kementerian Perhubungan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, situs pemerintahan dan situs berita.

Kata kunci : Laut, keamanan maritim, Pilihan Rasional, Indonesia, Tiongkok, *project 6*, suar, Jalur Sutra.

ANALYSIS OF THE FAILURE OF INDONESIA-CHINA COOPERATION IN PROJECT 6.

Kharisma Dwi Fausi

ABSTRACT

In this era of globalization, the distance is not a barrier for humans. The distance that stretches hundreds of kilometers up, different countries and regions as if getting close, as well as trade. Currently a country can sell goods from countries all over the world with ease. Currently sea lanes still holds a very important role lane to distribute goods traded. Not surprisingly, developed countries are very focused on maritime security issues. In theory a security maritime mentioned that all forms of threats that occur in the ocean either military or non military as environmental issues, into the realm of maritime security. China itself became one of the countries with a focus on maritime security, especially in the Malacca Strait. The tsunami that struck Aceh in 2004, making China will provide assistance flare repairs damaged by the tsunami known as the project 6. Cooperation officially started in 2011, but in 2013 the Government of Indonesia in this case the Ministry of Transportation considers this cooperation is complete without the help of China. Factors that make this cooperation canceled because the Chinese asked for sand to be sent to China and because of the urgency of making Indonesia project 6 independently resolve this. Moreover prepared Silk made waterway trade route is no longer the only Chinese. Proper theory to describe the above case is the theory of rational choice. Indonesia faced by the two options and choose the one that is considered most appropriate. The data used in this study are primary and secondary data. The primary data obtained through interviews at the Ministry of Transportation, while the secondary data obtained from books, articles, government sites and news sites.

Keywords: Sea, maritime security, Rational Choice, Indonesia, China, project 6, flare, Silk Roads.